

MODERASI BERAGAMA : LANDASAN ETIKA DALAM PEMILU 2024

Iyasti Ernawati

LPTQ Kabupaten Kutai Kartanegara

Email: iyastiernwati@gmail.com

Abstrak

Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi moderasi beragama sebagai landasan etika dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, dengan fokus pada upaya menciptakan pesta demokrasi yang damai dan menghindari potensi konflik berbasis agama. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan mengkaji literatur, jurnal, buku, dan dokumen relevan terkait moderasi beragama serta aplikasinya dalam konteks politik. Data dianalisis secara kualitatif melalui *content analysis* untuk menemukan tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama, dengan prinsip *wasathiyah* (jalan tengah), mampu menjadi solusi atas ancaman budaya kekerasan dan polarisasi politik di masyarakat. Moderasi ini menekankan penghormatan terhadap perbedaan, penerapan prinsip *tabayyun* (clarifikasi informasi), dan penghindaran perilaku ekstrem seperti *sukhriyyah* (merendahkan pihak lain). Selain itu, moderasi beragama mampu mendukung pelaksanaan Pemilu yang jujur, bertanggung jawab, dan akuntabel. Dalam perspektif agama, nilai-nilai universal seperti toleransi, keadilan, dan cinta kasih berperan penting dalam menjaga harmoni dan persatuan bangsa, terutama dalam menghadapi eskalasi politik. Dengan menjadikan moderasi beragama sebagai pedoman etika, Pemilu 2024 berpotensi menjadi perhelatan demokrasi yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman. Kolaborasi antara tokoh agama, politik, dan masyarakat diperlukan untuk merealisasikan prinsip-prinsip moderasi ini, sehingga dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat, damai, dan bermartabat.

Kata Kunci: *Moderasi Beragama, Etika Demokrasi, Wasathiyah.*

Abstract

The year 2024 marks a significant milestone in Indonesia's democratic history with the General Election (Pemilu). This study aims to analyze the relevance of religious moderation as an ethical foundation in the implementation of the 2024 Pemilu, focusing on efforts to create a peaceful democratic festivity and avoid potential conflicts rooted in religion. The research method employed is library research, which involves reviewing literature, journals, books, and other relevant documents related to religious moderation and its application in the political context. The data was qualitatively analyzed using content analysis to identify key themes relevant to the research objectives. The findings indicate that religious

moderation, based on the principle of wasathiyyah (the middle path), offers a solution to the threats of violent culture and political polarization within society. This moderation emphasizes respect for differences, the application of the principle of tabayyun (information clarification), and the avoidance of extreme behaviors such as sukhriyyah (demeaning others). Moreover, religious moderation can support the implementation of an honest, accountable, and responsible election. From a religious perspective, universal values such as tolerance, justice, and compassion play a vital role in maintaining harmony and national unity, especially amidst political tensions. By establishing religious moderation as an ethical guideline, the 2024 Pemilu has the potential to become a democratic event that not only reflects national values but also strengthens social cohesion amidst diversity. Collaboration among religious leaders, politicians, and society is essential to realize these principles of moderation, thereby fostering a democratic atmosphere that is healthy, peaceful, and dignified.

Keywords: Religious Moderation, Democratic Ethics, Wasathiyyah.

PENDAHULUAN

Tahun 2024 ini akan menjadi sejarah baru bagi perhelatan demokrasi bangsa Indonesia, yakni Pemilihan Umum (pemilu). Harapan besar masyarakat, akan menjadi awal dari pesta rakyat lima tahunan yang terbebas dari berbagai macam polarisasi. Sebagai suatu bangsa yang besar, Indonesia harus terus berjuang dalam menjaga keutuhan dan persatuan, di tengah benturan nilai, serta banyaknya kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Hal ini kerap kali menyebabkan bangsa Indonesia terlibat dalam ketegangan dan konflik yang beraroma agama. Ketegangan dan konflik tersebut sering kali dipicu oleh menguatnya politik identitas, agama sering kali di politisasi dalam hal perebutan kekuasaan. Persoalan ini seharusnya tidak terjadi apabila masing-masing warga negara menjadikan toleransi, dan sikap saling menghargai perbedaan sebagai hakikat dari negara multikultural yang beradab.

Menilik sejarah pada pemilu 2019 silam, terdapat salah satu hal yang menjadi persoalan di muka publik, sekaligus problematika di kalangan masyarakat, yakni munculnya istilah ‘cebong dan kampret’ yang disematkan oleh pendukung fanatik Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Fenomena ini membekaskan luka yang mendalam bagi ibu pertiwi, di mana hal tersebut menjadi ajang saling menjatuhkan antara kubu Jokowi dan Prabowo (Zuhro, 2019). Mirisnya, hal ini lah yang memicu terjadinya pecah belah bangsa Indonesia. Negara yang memiliki semboyan “Bhineka Tunggal Ika” dengan arti : berbeda-beda tetap satu, seharusnya dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya persatuan dan juga kesatuan bangsa. Namun, pada realitanya, alih-alih menjadikan

semboyan negara sebagai salah satu pedoman kehidupan bernegara, masyarakat justru seakan-akan acuh taka acuh, tidak peduli terhadap hal tersebut, sehingga menimbulkan banyak sekali kontroversi. Tentu, hal seperti ini lah yang patut diantisipasi agar pemilu 2024 mendatang bisa terealisasi dengan damai. Oleh karenanya, moderasi beragama hadir dengan mengetengahkan sikap dan cara pandang, agar setiap orang mengusahakan harmoni dalam perbedaan, dan juga salah satu jalan menuju terciptanya kondisi toleransi di tengah meriahnya pesta demokrasi yang akan datang. Paradigma moderasi beragama menjadi sangat urgent saat mengingat Indonesia akan menghadapi pemilu 2024. Dengan membumisaskan gagasan moderasi beragama, pemilu 2024 akan berlangsung secara demokratis dan mengukuhkan kedaulatan rakyat.

Moderasi beragama sebagai jalan tengah yang telah lama diterapkan oleh para pendiri bangsa ini. Dalam konteks bernegara, prinsip moderasi dapat mempersatukan tokoh kemerdekaan yang memiliki ragam pemikiran, ragam kepentingan politik, serta ragam agama, dan juga kepercayaan. Semuanya bergerak mencari titik temu untuk saling bahu membahu, berlapang dada dalam menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai kesepakatan bersama. Kerelaan dalam menerima NKRI sebagai bentuk final dalam bernegara dapat dikategorikan sebagai sikap toleran untuk menerima konsep negara-bangsa (Saifuddin, 2019; Effendi, 2020; Umar, 2021). Hal ini menjadi bukti nyata bahwasannya kekuatan moderasi beragama sangat berpengaruh terhadap bangsa Indonesia, maka dalam konteks ini, moderasi beragama pun berpotensi dalam menegakkan pemilu damai pada tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis berbagai literatur yang relevan terkait moderasi beragama sebagai landasan etika dalam pemilu 2024. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena yang menjadi fokus penelitian melalui kajian teoritis dan empiris yang bersumber dari artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen terkait lainnya (Roosinda, et al., 2021).

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, Pengumpulan Data: Mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber literatur yang relevan melalui database jurnal ilmiah, repositori akademik, dan buku referensi. Kriteria pemilihan literatur meliputi kesesuaian dengan topik, relevansi teoritis, dan validitas

empiris (Sarie, et al., 2023). Kedua, Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *content analysis* untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan digitalisasi dan mutu pendidikan. Analisis ini mencakup identifikasi elemen-elemen utama, pola, dan hubungan yang relevan dari berbagai sumber literatur (Setiadarma, et al., 2024). Ketiga, Proses Sintesis: Informasi yang telah dianalisis kemudian disusun secara sistematis untuk membangun argumentasi yang logis dan mendalam terkait moderasi beragama sebagai landasan etika dalam pemilu 2024.

Adapun Teknik analisis data pada Penelitian ini meliputi: Pertama, Reduksi Data: Menyaring informasi untuk memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Kategorisasi: Mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti moderasi beragama sebagai landasan etika dalam pemilu 2024. Penyimpulan: Menyusun simpulan berdasarkan hasil analisis, dengan memadukan temuan dari berbagai literatur untuk menjawab tujuan penelitian (Rozali, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Budaya Kekerasan : Ancaman Nyata Demokrasi Pada Pemilu 2024

Pupus sudah kebanggaan bangsa Indonesia yang selama ini mempromosikan diri sebagai bangsa yang ramah, serta memiliki tingkat toleransi yang tinggi nan kuat. Hal ini disinyalir, mana kala aktivitas yang bernuansa kekerasan, dan praktik-praktik kekerasan yang mencerminkan sikap intoleran justru terlihat marak dimana-mana (Sudarto, 2014). Masyarakat tidak lagi segan melakukan tindakan kekerasan yang bermula dari perbedaan pendapat pada saat diskusi. Ironisnya, budaya kekerasan itu diatasnamakan dalam membela suku, bahkan agama. Konflik demi konflik yang berbau kekerasan silih berganti terjadi dimana-mana. Padahal Allah SWT secara tegas melarang hambanya untuk bersikap keras.

Menurut Johan Galtung, kekerasan ialah suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan, dan juga paksaan. Kekerasan sangat berkaitan dengan pemaksaan. Kekerasan kerap dikaitkan pula dengan tindakan menundukkan dengan paksaan (Galtung, 2001). Masalah kekerasan menjadi semakin rumit dan kompleks ketika dipraktikkan dengan legitimasi agama, dan politik. Sebab, kedua hal tersebut menjadi unsur yang amat sensitif untuk membangkitkan emosi, bahkan menyulut terjadinya tindak kekerasan, baik yang dilakukan secara pribadi maupun komunal. Pemandangan

inilah yang kerap menjadi konsumsi masyarakat luas, baik melalui televisi, media sosial, maupun secara langsung.

Persoalan paling rumit adalah, ketika agama yang di dalamnya mengajarkan prinsip cinta kasih dan damai, ternyata juga dapat dengan mudah dirasuki budaya-budaya kekerasan. Marx Jourganes mayer, mengemukakan bahwa, agama sedang bangkit dengan wajah kekerasan yang menjalar secara global dengan dalih teror mengatasnamakan Tuhan. Indonesia sebagai bangsa yang *multireligion* dan *multiethnic*, maka seharusnya kesadaran utama yang harus di kedepankan ialah spiritualitas, karena pada dasarnya, setiap agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Namun, meskipun demikian, dalam ruang operasional, sangat terbuka kemungkinan ancaman konflik disintegrasi apabila konflik yang berlatar belakang agama dan politik tidak terselesaikan dengan baik. Terlebih lagi, pesta demokrasi 2024 sudah di depan mata, budaya kekerasan akan menjadi ancaman nyata masa depan bangsa, hal ini tentu menjadi tanggung jawab yang harus disusun dengan matang penyelesaiannya.

Untuk mengatasi permasalahan tindakan serta budaya kekerasan dalam bentuk dan alasan apa pun, titik persoalannya bukan hanya terletak pada bagaimana cara memutus lingkaran kekerasan tersebut. Sebab, dengan memutus lingkaran kekerasan, justru akan berpotensi menumbuhkan bentuk kekerasan baru (Bunga, 2019). Mengatasi permasalahan mengenai budaya kekerasan salah satunya dapat dengan terus merintis budaya damai melalui dialog-dialog yang lebih rasional. Dialog dalam hal ini, bukan dimaksudkan sebagai ajang untuk menunjukkan bahwasannya agama dan kelompok tertentu adalah yang paling baik. Dialog bukan juga bertujuan untuk merumuskan sebuah formula baru untuk menyelesaikan semua persoalan dan dapat memuaskan semua pihak. Pun juga bukan konfORTasi. Namun, dialog merupakan usaha untuk membangun kesepahaman atas perbedaan-perbedaan yang ada. Selain dari pada itu, dialog juga diharapkan bisa membuka adanya kesediaan untuk bersama-sama merenungi pertanyaan tentang, apalagi yang lebih baik untuk menjembatani adanya perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga hal ini tidak lagi menjadi penyebab timbulnya kekerasan (Bagir, 2011). Pada dasarnya, anti kekerasan adalah sebuah kekuatan (Ghandi, 1968).

Dalam konteks masyarakat di Indonesia, demokrasi bukan hanya sebatas pluralisme politik, namun juga pluralisme budaya, etnis, dan juga agama. Terjadinya konflik sosial yang berlindung di balik agama dan etnis, sama sekali bukan justifikasi dari doktrin agama. Karena pada fitrahnya, semua agama mengajarkan sikap saling mengasihi,

toleransi, serta menghargai sesama. Dalam pluralisme politik, agama seharusnya berperan sebagai dinamisator demokratisasi dan pengawal moral politik, bukan kendaraan politik. Melihat hal ini, harus menjadi cita-cita bersama, bahwa pluralisme politik harus beriringan dengan pluralisme lainnya, yakni agama, etnis, budaya, golongan, serta penghayatan dan ketaatan terhadap hukum. Hal ini di dasari sebagai salah satu bentuk upaya dalam memerangi budaya kekerasan yang menjadi ancaman, khusunya pada pemilu 2024.

B. Moderasi Beragama : Manifestasi Tegaknya Pemilu Damai 2024

Prof. Dr. Muhammad Quraish Sihab berpendapat bahwa, pengertian moderasi beragama yang paling mendekati dalam istilah Al-Qur'an ialah *wasathiyyah*. *Wasath* berarti pertengahan dari segala sesuatu. Kata *wasath* juga berarti adil, baik, terbaik, serta paling utama. Setidaknya ada tiga kunci pokok, dalam penerapan *wasathiyyah* yaitu : pengetahuan yang benar, emosi yang terkendali, serta kewaspadaan. Tanpa ketiga hal ini, *wasathiyyah* akan sangat sulit, bahkan mustahil diwujudkan.

Paham moderasi beragama atau *wasathiyyah* diartikan sebagai pertengahan atau adil untuk menengahi pendekatan-pendekatan ekstrem yang banyak tumbuh di masa kini, karena posisi tengah menjadikan manusia tidak memihak ke kiri maupun ke kanan, selain itu, *wasathiyyah* dapat pula diartikan sebagai suatu jalan yang dapat menghantarkan serta mengajarkan umat untuk terus berlaku adil (Shihab, 2019). Moderasi sebagai manifestasi umat beragama, terutama umat Islam yang agamanya menjadi rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*), senantiasa tidak menekankan pada kekerasan dalam menerapkan keislamannya, serta tidak ekstrem dan radikal. Sebab karakteristik moderasi beragama itu sendiri, adalah berperilaku normal (*tawasuth*) dalam mengimplementasikan ajaran agama, menghindari kekerasan, toleran terhadap berbagai perbedaan pendapat, memprioritaskan dialog atau musyawarah, serta menafsirkan teks secara kontekstual.

Moderasi beragama sangat perlu diimplementasikan pada ramainya pesta demokrasi 2024 yang akan datang. Dalam hal ini, moderasi beragama mengambil jalan tengah untuk mencari persamaan, dan bukan perbedaan, apalagi pembedaan pada saat pelaksanaan pemilu, demi terciptanya suasana yang damai. Moderasi beragama menjadi salah satu hal yang menarik, dan tentunya sangat apik apabila dapat ditegakkan, terlebih pada saat pemilu mendatang. Hal ini akan menjadi tawaran, serta terobosan baru yang dapat dibumisasikan.

Melihat hari ini, moderasi beragama menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama RI, diantara dua program lainnya yaitu kebersamaan umat, dan integritas data, yang telah digaungkan oleh mantan Menteri Agama RI, H. Lukman Hakim Saifuddin pada tahun 2019 silam. Program ini menjadi salah satu dari program nawacita serta kebijakan yang mengikat, dan terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden (perpres) No. 18 tahun 2020, kebijakan ini diwajibkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu, hal ini lah yang kemudian dapat dijadikan salah satu pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kancang politik 2024, harus diakui bahwasannya, tatanan demokrasi di Indonesia belum sutuhnya mapan dan masih banyak sekali terdapat kekurangan di dalamnya. Hal tersebut menjadi tanggung jawab para pemangku kebijakan yang harus, dan segera diselesaikan. Akan tetapi, bukan berarti ekstrimisme serta radikalisme menjadi solusi untuk menyempurnakan tatanan sistem demokrasi di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kultur ketimuran, dan mengedepankan sopan santun, serta musyawarah dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Kultur inilah, yang membuat bangsa Indonesia sangat dekat dengan nilai-nilai demokrasi. Oleh karenanya, dalam menghadapi eskalasi politik pada pemilu 2024 yang dimungkinkan akan menumbuh suburkan politik yang keras, tidak dapat hanya dihadapi dengan pendekatan keamanan, namun juga dibutuhkan pola berbeda yang berbentuk ide dan gagasan. Ide moderasi beragama yang dipelopori oleh Kementerian Agama sejak tahun 2019, menjadi bagian penting dalam mitigasi politik kekerasan, sekaligus menjadi unsur penting dalam menjaga konsolidasi menguatnya narasi politik yang kontra-produktif dengan tujuan demokrasi.

Pesta demokrasi 2024 diharapkan bisa menjadi perhelatan pemilu berkualitas, serta dapat melahirkan pemimpin bangsa yang berkarakter, juga dapat mencetak sosok pemimpin yang akan menghadirkan kemajuan di masa yang akan datang. Penerapan moderasi beragama dengan sikap *wasathiyah* yang menjadi landasan dalam etika pemilu 2024 merupakan aspek penting dalam pembangunan demokrasi yang sehat, sehingga diperlukan kerjasama antara tokoh agama, tokoh politik, stakeholder, maupun masyarakat secara umum, untuk bersama-sama menanamkan sikap *wasathiyah*, karena pada

akhirnya, sikap tersebut akan mengilhami cara masyarakat bersikap tidak berlebihan dalam menanggapi ataupun merespon isu-isu politik 2024.

Adapun bentuk dari sikap moderasi beragama (wasathiyyah) yang dapat diterapkan, dalam rangka menyikapi tantangan yang ada, dan sekaligus menjadi landasan etika dalam pemilu 2024 mendatang, antara lain sebagai berikut:

1. Menghindari Perilaku *Sukhriyyah*

Sukhriyyah merupakan suatu sikap atau perilaku yang terkesan seperti merendahkan orang lain. *Sukhriyyah* biasa dilakukan dengan mencaci maki, mengolok-olok, dan menghina seseorang, hingga berakhir dengan timbulnya kebencian dalam diri. *Sukhriyyah*, atau lebih sering dikenal dengan *membully*, tidak hanya terjadi pada kehidupan sehari-hari, namun juga pada pesta demokrasi. Hal ini pasti akan sangat merugikan pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya untuk menghindari perilaku tersebut, sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S Al-Hujurat [49] : 11, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَأْمِرُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَتَابُرُوا بِالْأَلْقَابِ بِنُسَاءِ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Ayat ini menjelaskan bahwa, Allah SWT tidak menyukai orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, menghina, mengolok, apalagi menjatuhkan satu sama lain. Karena, bisa jadi orang yang dihina ternyata lebih baik di sisi Allah SWT. Dari ayat ini, dapat diketahui benang merahnya terhadap peristiwa ‘cebong dan kampret’ yang sangat ramai di media sosial pada saat pemilu 2019. Platform media sosial yang sangat bebas, membuat penggunanya dapat dengan mudah melakukan apa yang diinginkan, tanpa berpikir dampak seperti apa yang kemudian akan terjadi. Pengguna media sosial hari ini, seolah-olah tidak peduli dengan perbuatan negatif yang dilakukan, bahkan menyepelekan hal yang pada kenyataanya sangat membahayakan. Sehingga, hal ini menimbulkan banyak

sekali konflik yang terjadi, terlebih dalam menghadapi pemilu mendatang. Oleh sebab itu, sebagai umat beragama, sudah sepatutnya untuk menghindari perilaku *sukhriyyah*, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun nanti pada saat ramainya pesta demokrasi 2024, untuk tetap menjaga keutuhan umat beragama, bangsa, dan negara.

2. Mengedepankan Sikap *Tabayyun*

Tabayyun berasal dari kata *tabayyana-yatabayyanu-tibyanaan* yang memiliki arti nyata atau memberi penjelasan. Secara terminologi, *tabayyun* diartikan sebagai meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan, dan lainnya, hingga benar-benar terlihat jelas permasalahannya (Agustin et al., 2020). Dalam konteks Al-Qur'an, menilai kebenaran suatu informasi menjadi suatu hal yang sangat penting, karena apabila informasi diterima tanpa mengetahui kebenarannya, maka ini akan menimbulkan adanya pertikaian, terlebih apabila berkenaan dengan isu politik yang dapat dengan mudah memancing emosi seseorang. Adapun ayat yang masyhur membahas *tabayyun* adalah Q.S. Al-Hujurat [49] : 6 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوهُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَذِيرٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.

Mengenai ayat ini, Aidh Al-Qarni mengartikan bahwa, *tabayyun* sebagai upaya untuk memperacayai jika tidak mengetahui kebenaran dan memberikan kepastian pada kejujuran (Al-Qarni, 2008). Selain itu, Quraish Shiab dalam tafsir Al-Misbah, memandang *tabayyun* sebagai pemilihan informasi tentang sesuatu yang penting atau tidak, serta dapat dipercaya atau tidak. Orang beriman tidak dituntut dalam penyelidikan info dari siapapun yang tidak penting, dan didengar tidak wajar. Kemudian, *tabayyun* dapat diselesaikan dari pihak lain yang jujur, dengan integritas tinggi dalam penyampaian hal yang wajar, benar, dan tentunya dapat dipercaya. Tujuan dari *tabayyun* adalah untuk menghindari, sekaligus mencegah prasangka buruk dari individu yang tidak dapat bertanggung jawab (Shihab, 2020).

Melihat pandangan-pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya, peran *tabayyun* dalam mengimplementasikan pemilu damai 2024 merupakan manifestasi yang patut disyukuri, dan tentunya harus direalisasikan. Sikap *tabayyun* akan mampu

melahirkan umat berjiwa moderasi (*wasathiyyah*), terutama dalam pandangannya terhadap pesta demokrasi mendatang.

3. Penerapan Tiga Prinsip Dasar Moderasi

Moderasi beragama sebagai landasan etika dalam kepemiluan tentunya memiliki prinsip yang harus ditegakkan. *Pertama*, penghormatan terhadap sikap politik dan pilihan orang lain dalam kepemiluan. Politik kesalingan, yakni saling menghargai, dan juga tidak menjelaskan satu sama lain hanya karena perbedaan pilihan. Penghormatan juga harus bersikap biasa dalam mendukung, maksudnya adalah, tidak ekstrem dan berlebihan. Tidak menganggap urusan dukungan politik adalah segalanya, dan perkara hidup mati seseorang. Jika berbeda yang di dukung, maka dianggap musuh yang wajib diperangi. Bukan seperti itu, politik adalah penghormatan pilihan, perbedaan pilihan politik adalah perkara biasa, dan tidak perlu dibesar-besarkan.

Kedua, aktualisasi kejujuran. Dalam hal politik, sering kali terjadi fenomena, apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kebenarannya. Pemilu yang jujur adalah pemilu yang menyajikan informasi apa adanya. Informasi yang ada tidak perlu ditutup-tutupi, apalagi dibuat-buat. Kejujuran merupakan keterbukaan informasi, keterbukaan data-data kepemiluan, keterbukaan dana pemilu, serta keterbukaan proses dan juga hasil dari pada pemilu itu sendiri. Kejujuran adalah pesan agama untuk mewujudkan keadilan.

Ketiga, tanggung jawab terhadap pilihan politik sekaligus menjalankan pemerintahan secara akuntabel. Akuntabilitas antara calon dan rakyat harus terus dibangun. Demokrasi yang baik itu, keterlibatan seluruh komponennya dari sebelum pemilu, saat pemilu, sampai pada setelah pemilu, meskipun padasaat pemilu partisipasinya terkadang sangat rendah. Hal inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab bersama, menjaga amanah dari semua sisi. Menjaga Amanah dimulai dari penyelenggaraan pemilu, baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta dengan jajarannya. Semua bertanggung jawab menjaga amanah untuk menjalankan rangkaian tahapan pemilu, agar prosesnya berjalan dengan demokratis, dan tentunya memiliki hasil yang berkualitas.

KESIMPULAN

Tidak ada satu pun hal dalam kehidupan yang tidak diberi arahan oleh agama, baik yang sifatnya langsung, maupun tidak. Baik yang bersifat praktik, atau pun pemikiran, baik yang sifatnya teknis, atau pun moral. Mulai dari Iman, Islam, dan juga Ihsan. Mulai dari

ibadah, muamalah, hingga akhlakul karimah. Oleh karenanya, merupakan hal yang mustahil, apabila agama harus dikeluarkan dari persoalan politik, terlebih lagi kepemiluan. Karena politik penuh dengan kotoran, maka lantas agama tidak ikut campur. Agama, dan tentu para tokoh agamanya cukup berada di Menara gading, duduk di keimaman bersama para makmumnya denga naman dan nyaman. Ini merupakan hal yang salah.

Justru karena politik penuh dengan intrik, agama harus turut andil di dalamnya. Justru karena politik sering kali menghalalkan segala cara, maka agama harus jauh lebih tegas. Justru karena penegakan hukum pada pemilu kerap tidak berhasil, maka dalam hal ini agama perlu melakukan Batasan. Agama mengajarkan kejujuran, maka pemilu harus dilaksanakan dengan transparan. Agama mengajarkan Amanah, maka politik wajib mempunyai daya akuntabilitas dan penuh dengan tanggung jawab. Agama mengajarkan kecerdasan, maka politik harus bersifat deliberative, di mana perbincangan mengenai pemilu wajib mendidik dan beradab. Agama pun mengajarkan untuk berucap dengan baik, maka politik pun harus disampaikan dengan kesantunan.

Dalam hal ini, moderasi beragama hadir pada kancah politik pemilu tahun 2024, sebagai wajah baru dalam landasan beretika, demi terwujudnya pemilu 2024 yang damai. Pesta demokrasi bukanlah ajang penerapan kekerasan yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Akan tetapi, pesta demokrasi harus menjadi tempat, di mana masyarakat bisa mengekspresikan dirinya dengan baik, tanpa saling menindas satu dengan lainnya. Sebagaimana yang diucapkan almaghfurlah K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) "yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan".

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, E. P. M., Hardivizon, H., & Admizal, I. (2020). *Tabayyun Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Fi Zhilal Al-Quran)*. IAIN Curup.
- Al-Qarni, A. (2008). *Tafsir Muyassar, Terjemahan Tim Penerjemah Qisthi*. Pers. Jilid 1.
- Bagir, Z. A. (2011). *Pluralisme Kewargaan : Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Mizan dan CRCs.
- Bunga, D. (2019). Analisis cyberbullying dalam berbagai perspektif teori viktimologi. *Vyavahara Duta*, 14(2), 48–63.
- Effendi, D. I. (2020). *New normal dalam sudut pandang pemikiran moderasi beragama dan kebangsaan*.
- Galtung, J. (2001). *Peace by Peacefull Mean. Peace and Peace Development and Civilization*. Oslo: PRIO.
- Mahatma Ghandi. (1968). *Semua Manusia Bersaudara*. Yayasan Obor dan Gramedia.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiaty, S.

- H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing.
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan analisis konten dan analisis tematik. *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, 19, 68.
- Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., Suiraoka, I. P., Darwin Damanik, Efrina, G., & Sari, R. (2023). *Metodologi Penelitian*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Setiadarma, A., Abdullah, A. Z., Sadjijo, P., & Firmansyah, D. (2024). Tinjauan Literatur Transformasi Sosial dalam Era Virtual. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(1), 232–244.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati Group.
- Shihab, M. Q. (2020). *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*. Lentera Hati Group.
- Sudarto. (2014). *Wacana Islam Progresif*. Ircisod.
- Umar, H. N. (2021). *Islam Nusantara: Jalan panjang moderasi beragama di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Zuhro, R. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16, 69. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>